



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SELASA KLIWON

18 JULI 2023 (29 BESAR 1956 / TAHUN LXXVIII NO 278)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Jadi Tersangka Mafia TKD, Langsung Ditahan Krido Terima Gratifikasi Rp 4,7 M



Kejati Dispersuasi DIY Krido Suprayitno saat ditetapkan sebagai tersangka kasus Tanah Kas Desa di Kejati DIY, Senin (17/7).

YOGYA (KR) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispersuasi) DIY Krido Suprayitno (KS) sebagai tersangka terkait kasus mafia Tanah Kas Desa (TKD) di Caturtunggal Depok Sleman. Diduga tersangka menerima gratifikasi dari terdakwa RS senilai Rp 4,731 miliar berupa dua bidang tanah dan uang.

Kajati DIY Ponco Hartanto SH MH mengungkapkan, setelah mengikuti secara intens dan menemukan dua alat bukti, penyidik Kejati DIY menetapkan status KS dari saksi menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini terkait gratifikasi yang diterima oleh KS.

"Diduga tersangka menerima gratifikasi dua bidang tanah di Purwomartani Kalasan seluas 600 m2 dan 800 m2 dengan nilai Rp 4,520 miliar dari terdakwa RS pada Tahun 2022. Kedua tanah itu sudah bersertifikat atas nama KS," ungkap Kajati DIY didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH di kantornya, Senin (17/7) sore.

Di samping dua bidang tanah, tersangka juga me-

nerima uang tunai dan transfer dari terdakwa RS. Tak hanya itu, ATM milik istri terdakwa RS juga dibawa oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. "Uang di ATM milik istri terdakwa RS itu ditarik oleh KS untuk kepentingan pribadi tersangka. Total uang yang diterima sekitar Rp 211 juta," paparnya.

Untuk sementara ini, total gratifikasi yang diterima tersangka ini baik tanah dan uang sebesar Rp 4,731 miliar. Kemungkinan jumlah itu bisa bertambah. "Itu baru penghitungan sementara. Saat ini kami masih menunggu hasil dari

PPATK," terangnya.

Dengan ditetapkan sebagai tersangka, kemarin penyidik langsung melakukan penahanan terhadap KS. Selain itu penyidik juga menyita uang tunai Rp 300 juta dari tersangka. "Tersangka kami tahan dengan alasan supaya tidak mempengaruhi saksi-saksi, tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri," tegas Kajati.

Menurutnya, tersangka yang seharusnya sebagai pengawas desa justru komunikasi aktif dengan terdakwa RS. Berdasarkan hasil kloning pembicaraan, tersangka banyak pembi-

caran aktif dengan terdakwa RS terkait masalah tanah. "Seharusnya tersangka ini mengawasi izin TKD, tapi justru kerja sama dengan mafia tanah," urainya.

Ponco menegaskan, gratifikasi yang diterima KS semuanya untuk kepentingan pribadi. Padahal yang bersangkutan (KS) mengetahui perbuatan RS (telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TKD di Caturtunggal) yang telah menambah keluasan lahan tanah kas desa yang disewa PT Dez-tama Putri Sentosa dari luasan 5.000 meter persegi

* Bersambung hal 7 kol 1



Kajati DIY Ponco Hartanto SH MH memberikan keterangan pers kasus mafia TKD di Caturtunggal, Depok, Sleman.

CEGAH MUTILASI PERLU KONTROL WARGA

UMY Adakan Salat Gaib dan Doa Bersama

BANTUL (KR) - Solidaritas untuk korban mutilasi, Senin (17/7) malam mengadakan salat gaib dan doa bersama di halaman kampus UMY Tamantirto Kasihan Bantul. Kegiatan yang dimotori mahasiswa Fakultas Hukum UMY ini, dilakukan setelah ada kesimpulan penyidik Polda DIY, bahwa korban mutilasi adalah mahasiswa kampus tersebut.

Dekan FH UMY Dr Iwan Satriawan mengemukakan,

kegiatan tersebut dilakukan karena duka mendalam dengan kepastian yang diperoleh dari kepolisian. "Kami sudah berkomunikasi dengan keluarga yang diwakili kakak korban yang sudah datang serta ada tantanya yang tinggal di Yogya," jelas Iwan, Senin petang. Pihaknya, juga sudah menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban.

Dikemukakan Iwan Satriawan, saat berkomunikasi dengan keluarga, kakak yang mewakili mem-



Iwan Satriawan

kasi dengan keluarga, kakak yang mewakili mem-

pertanyakan apakah dirinya mengenal sang adik. "Saya katakan, saya mengenal korban dan korban juga sedang mengambil mata kuliah yang saya ampu. Saya mengenal sebagai mahasiswa yang aktif juga dalam kepanitiaan. Bahkan korban baru saja mendapatkan dana hibah penelitian dan menjadi ketua tim," papar Iwan.

Sejauh ini, UMY memang belum mengeluarkan

pernyataan resmi atas kasus mahasiswa yang menjadi korban mutilasi. Hingga saat ini, UMY masih terus berkomunikasi dengan tim yang menangani kasus ini dari Polda DIY. "Kami hanya bisa menyampaikan informasi, korban adalah mahasiswa kami. Tahapan penyidikan belum sampai pada apa motif di balik pembunuhan keji tersebut," ungkap Iwan.

* Bersambung hal 7 kol 1

BUDI ARIE SETIADI JADI MENKOMINFO

Presiden: Selesaikan Proyek BTS

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dilantik, Budi Arie Setiadi, untuk menuntaskan proyek pembangunan menara Base Transceiver System (BTS) sesuai rencana Pemerintah, meskipun apa-

rat penegak hukum sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek itu.

"Saya ingin yang perta-

ma di Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum

silakan berjalan, kita hormati, tetapi penyelesaian BTS juga harus berjalan," kata Presiden Jokowi sete-

lah Pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).

Presiden mengatakan, pembangunan BTS di seluruh daerah, terutama di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) sangat penting untuk memberikan pelayanan akses komunikasi dan digitalisasi kepada masyarakat.

* Bersambung hal 7 kol 5



Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Tidak Terbit:

SEHUBUNGAN Rabu (19 Juli 2023) besok merupakan Hari Libur Nasional Hari Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, maka SKH Kedaulatan Rakyat tidak terbit. KR akan mengunjungi pembaca kembali, Kamis (20 Juli 2023). Pembaca, pemasangan iklan dan relasi harap maklum. (Penerbit)-d

Analisis Penduduk 8 Miliar

Dr Edy Purwo Saputro

PENDUDUK baik secara kuantitas dan kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan, meski kemajuan teknologi memungkinkan keberadaan penduduk sebagai SDM akan tergantikan sumber daya robotik n SDR. Namun bisa dibayangkan, saat ini penduduk dunia berjumlah 8 miliar. Sehingga tidak hanya butuh makan n minum, juga perumahan dan permukiman. Sementara keterbatasan lahan adalah fakta riil dibalik perbandingan antara deret ukur dan deret hitung.

Jadi, kuantitas dalam 8 miliar penduduk pasti berkaitan dengan tantangan kualitasnya. Dengan peluang dan tantangan dari 8 miliar penduduk maka sangat beralasan jika United Nation Population Fund (UNFPA n Dana Kependudukan PBB) dan BKKBN, Rabu (21/6) di Jakarta merilis laporan Situasi Kependudukan Dunia 2023 berjudul: e8 Billion Lives, Infinite Possibilities, the case for rights and choices! (8 Miliar Kehidupan).

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:48	15:09	17:40	18:53	04:33

Selasa, 18 Juli 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Jemaah Haji 2023 Peroleh Sertifikat

MADINAH (KR)

Seluruh jemaah haji 2023 berhak sertifikat haji yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat diberikan dalam bentuk tercetak melalui Kanwil Kemenag di kabupaten/kota asal jemaah.

Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengungkapkan hal itu di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Senin (17/7). "Kami sudah menerbitkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke seluruh Kanwil Kemenag provinsi seluruh Indonesia. Kami menyampaikan tiap kepala Kemenag kabupaten/kota untuk mencetak sertifikat tersebut berdasarkan asal domisili jemaah," papar Arsad.

Ia menyatakan, penerbitan sertifikat haji oleh



pemerintah itu merupakan yang pertama kalinya dilakukan sepanjang penyelenggaraan haji. Selama ini, walaupun ada, sertifikat hanya diterbitkan pihak-pihak tertentu, seperti pihak maskapai, yang tidak mencakup semua jemaah.

Pengambilan sertifikat, menurut Arsad, dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak harus paspor. "Khawatirnya mungkin apakah pada saat pulang ke Tanah Air paspornya tidak ada kan saya kira ia bisa menunjukkan dalam bentuk KTP atau identitas lainnya," tutur Arsad. Ia menekankan, jemaah tidak dipungut biaya untuk mendapatkan sertifikat haji.

* Bersambung hal 7 kol 5

PROMO SENAM HAMIL

Benefit:

- Konsultasi seputar ASI
- Welcome Drink

Rp30.000
Rp25.000

RS PKU Bantul

VAKSIN MENINGITIS

08118550060

0818-376-888

Badan Sehat Pendidikan Lancar

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● KETIKA saya pinjam motor paman untuk suatu keperluan, di jalan saya isi BBM di SPBU. Selesai mengisi BBM, saya tidak tahu cara menghidupkan motor karena menggunakan teknologi antimingki. Setelah membuka tutorial di YouTube, baru bisa menghidupkan motor itu. (Ai Nasyrah Nurdea, Jalan Sukarno Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)-d